

## RESEPSI PESAN TEKS REKOMENDASI PADA SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### MESSAGE RECEPTION ON RECOMMENDATIONS TEXT IN THE INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING AUDIT RESULTS AT INDONESIAN AUDIT BOARD

Ery Kurnia Ady Wibowo<sup>1</sup>, Prahastiwi Utari<sup>2</sup>, dan Sri Hastjarjo<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami no. 36A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>1</sup>erywibowo1@gmail.com, <sup>2</sup>prahastiwi@staff.uns.ac.id, <sup>3</sup>sri.hastjarjo@staff.uns.ac.id

Diterima : 17 Juni 2019

Direvisi : 18 Oktober 2019

Disetujui : 25 Juni 2020

#### ABSTRACT

*A communication message is not necessarily accepted as it was meant by the sender. The same applies with messages contained in information systems for monitoring audit response (SiPTL) developed by Indonesian Audit Board (BPK RI) to improve its performance in monitoring the progress of response towards audit recommendations. This study observed the reception of textual messages in the system using encoding/decoding approach from Stuart Hall. SiPTL re-encodes the text, but the reception is determined by individual's reading and interpreting. The research aimed to determine the meaning between auditors and auditee in understanding information on recommendations of the BPK RI's financial audit. The research design used was descriptive qualitative approach. Data was collected through semi-structured interviews. This study resulted in informants' understanding of textual recommendation towards audit results using SiPTL. The findings indicated that there was a meaning dissimilarity of the message due to differences in the working environment, interpretations of recommendations, the presence or absence of inspection experience, and informants' occupations.*

*Keywords: Message Reception, Financial Audit, E-Government*

#### ABSTRAK

Sebuah pesan komunikasi tidak selalu diterima sebagaimana dimaksudkan oleh pengirimnya. Demikian pula dengan pesan dalam sistem informasi pemantauan tindak lanjut (SiPTL) yang dikembangkan oleh BPK RI untuk menunjang kinerjanya dalam memantau perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan. Penelitian ini mengamati resepsi pesan teks dalam sistem tersebut dengan menggunakan pendekatan *encoding/decoding* dari Stuart Hall. Sistem akan mengodekan ulang teks media tersebut, namun penerimaannya ditentukan oleh individu dalam membaca dan memaknai teks media tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan auditor dan *auditee* terhadap rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam audit keuangan BPK RI. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur. Penelitian ini menghasilkan pemaknaan informan terhadap teks rekomendasi hasil pemeriksaan dalam SiPTL. Temuan penelitian menunjukkan bahwa disimilaritas pemaknaan pesan terjadi karena faktor perbedaan lingkungan pekerjaan, interpretasi atas kalimat rekomendasi, ada atau tidaknya pengalaman pemeriksaan, dan latar belakang pekerjaan dari informan.

Kata Kunci : Resepsi Pesan, Audit Keuangan, *E-Government*

## PENDAHULUAN

Komunikasi secara umum merupakan proses satu atau beberapa orang, sejumlah kelompok, organisasi, ataupun masyarakat dengan membentuk serta menggunakan informasi untuk berhubungan dengan lingkungan ataupun pihak lain. Dance & Larson (1976) merangkum 126 definisi komunikasi yang memiliki pandangan yang berlainan. Secara terminologis, pada dasarnya para ahli telah mengartikan komunikasi dari beragam perspektif, mulai dari perspektif filsafat, sosiologi, serta psikologi (Ujang, 2007). Secara umum, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang memiliki arti atau makna tertentu (Fulk, 1987). Dalam kondisi lain, komunikasi dipahami sebagai proses untuk menyampaikan informasi ataupun gagasan dari satu orang kepada orang lain, bisa berupa pikiran atau perasaan, melalui sarana dan saluran komunikasi tertentu.

Perkembangan saluran atau media komunikasi dimulai dari era komunikasi tulisan, komunikasi cetak, telekomunikasi, hingga era komunikasi interaktif yang berlangsung saat ini yang memunculkan media komunikasi baru. Media komunikasi baru pada umumnya memanfaatkan internet atau komputer atau telepon genggam sebagai saluran pembawa informasi dari pengirim ke penerima pesan (Ellis, 2010). Komunikasi dengan konektivitas internet akan memungkinkan masyarakat menjalin hubungan sosial yang lebih baik di antara keluarga, teman, dan jaringan bisnisnya, serta akan memberikan penguatan psikologis positif dan menambah motivasi (Choudrie *et al.*, 2017).

Media baru sering juga disebut dengan media digital. Media digital memungkinkan

adanya konten berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital yang kemudian disalurkan melalui jaringan kabel optik, satelit ataupun gelombang mikro (Holmes, 2010). Menurut Flew (2008), karakteristik utama internet sebagai media yaitu teknologi berbasis komputer, bersifat hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel, berpotensi untuk interaktif, dapat bersifat sebagai publik ataupun privat, peraturan tidak mengikat, memfasilitasi kesalingterhubungan, tidak tergantung lokasi, dan dapat diakses oleh komunikator individu.

Dalam menghadapi era digital ini, salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu adaptasi proses komunikasi melalui proses adopsi inovasi komunikasi (McLuhan, 2001). Dengan adanya perubahan sosial dan teknologi yang berkembang pesat tersebut maka perlu mengganti cara-cara lama dengan teknik-teknik baru (Gachene, 2016).

Di sektor pemerintahan, difusi inovasi dikemas dalam program *electronic-Government (e-Government)*. Secara umum, *e-government* adalah penerapan produk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan (PANRB, 2014). Program tersebut merupakan langkah awal perubahan yang diharapkan dapat mengimbangi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi komunikasi di bidang pemerintahan. Penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang awalnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan media elektronik sehingga mempermudah proses pelayanan (Dance & Larson, 1976). Kecanggihan teknologi internet membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang diharapkan dapat membuat proses bisnis

menjadi lebih efektif dan efisien, juga hemat biaya dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi alasan BPK mengadopsi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) Hasil Pemeriksaan dalam mendukung kinerjanya.

Aplikasi SiPTL berbasis web dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara *realtime* antara BPK dengan entitas yang diperiksa. Terobosan baru ini diharapkan memberikan kemudahan dalam proses input data secara benar dan *realtime*. Teknologi baru yang digunakan harus memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional (Kenneth & Jane, 2012). Penggunaan SiPTL selain dilatarbelakangi oleh lokasi geografis entitas dan perkembangan teknologi, juga didorong oleh peningkatan jumlah temuan yang cukup pesat dan rekomendasi pemeriksaan yang dihasilkan BPK, baik dalam jumlah maupun nilainya. Selama periode 2006-2017, BPK telah menerbitkan lebih dari 437 ribu rekomendasi hasil pemeriksaan dengan nilai ekuivalen USD 18 miliar (BPK-RI, 2017).

Keputusan untuk menggunakan inovasi baru tidak bisa terlepas dari unsur-unsur komunikasi. Hal itu selaras dengan pemikiran Rogers yang menyatakan bahwa inovasi merupakan serangkaian proses untuk mengomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif (Rogers, 2003). Pratminingsih (2006) menyebutkan bahwa komunikasi memiliki lima unsur, antara lain komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, dan efek. Komunikator dapat disamakan dengan pemilik informasi, pesan merupakan pokok informasi yang perlu disampaikan, saluran komunikasi merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk

menyebarkan informasi, komunikan merupakan anggota sistem sosial sebagai sasaran dari penyampaian informasi dan efek merupakan konsekuensi dari pemahaman akan pesan yang diterima melalui media yang dipilih - apakah sesuai atau tidak sesuai - (Meyrowitz, 1999). Penggunaan inovasi SiPTL ini akan sangat tergantung dengan pemahaman entitas terhadap redaksi bahasa rekomendasi atau komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kekurangan komunikasi tertulis tentunya akan berdampak pada penerima informasi, karena penerima informasi bisa saja tidak mengerti mengenai makna dan maksud dari informasi yang ditulis tersebut.

Hall (1997) menjelaskan bahwa di dalam analisis resepsi pesan, teks dan penerimanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, khalayak akan merepresentasikan dan menginterpretasikan informasi pada teks berdasarkan latar belakang sosial dan budaya serta pengalaman mereka masing-masing. Analisis resepsi menitikberatkan pada pengindraan individu dalam proses *decoding*, yaitu proses pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas teks media, dan bagaimana pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan isi media. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa masing-masing individu secara aktif membaca teks media dengan cara memberikan makna dan pemahaman sesuai dengan pengalaman yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari (Fulk, 1987).

Model *encoding/decoding* menurut Hall (1997) merupakan sebuah pendekatan yang melihat pembaca sebagai objek sasaran dan sekaligus sebagai pemilik hak. Teks media memiliki arti tertentu yang dikodekan ulang,

akan tetapi penerimaannya ditentukan dari pembacaan dan pemaknaan individu terhadap teks media tersebut. Pesan yang telah dikirimkan akan memunculkan bermacam efek kepada audiens saat diterima. Sebuah pesan yang sama dapat membuat pembaca menjadi terpengaruh, terhibur, terbujuk, dengan konsekuensinya yaitu memunculkan persepsi, kognitif, emosi, ideologi, dan perilaku yang sangat kompleks. Hall (1997) mengidentifikasi tiga kategorisasi proses *encoding/decoding* sebuah pesan, yaitu *dominant reading*, *negotiated reading*, dan *oppositional reading*.

Pemaknaan dominan (*dominant reading*) terjadi ketika kode yang disampaikan diterima secara umum, juga dimaknai secara umum sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca pesan. Pemaknaan yang dinegosiasikan (*negotiated reading*) berlangsung saat kode yang disampaikan penulis pesan ditafsirkan secara terus-menerus oleh kedua belah pihak. Kode yang diterima khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum, tetapi khalayak akan menggunakan kepercayaan dan keyakinan tersebut dan melakukan kompromi dengan kode yang disediakan oleh penulis pesan. Pemaknaan oposisi (*oppositional reading*) terjadi ketika pembaca teks memahami dan melakukan penandaan secara berbeda atas pesan teks atau kode yang disampaikan oleh penulis.

Dengan menggunakan pemikiran Hall (1997) tersebut, penerimaan pesan dianggap diterima secara dominan apabila jawaban informan sama persis atau mendekati maksud si pembuat rekomendasi. Adapun penerimaan negosiasi muncul apabila ada perbedaan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang dianggap cukup oleh informan tetapi masih dianggap kurang lengkap oleh pihak pembuat rekomendasi. Oleh karena itu perlu dilakukan

negosiasi atas penyelesaian rekomendasi tersebut. Terakhir adalah pemaknaan oposisi, yang terjadi apabila informan memaknai pesan yang disampaikan oleh pembuat rekomendasi secara berbeda.

Berkenaan dengan penerimaan pesan, Sely dan Aladdin (2019) melakukan penelitian dengan menyoroti insiden yang terjadi ketika seorang mahasiswa melakukan aksi interupsi kepada Presiden Joko Widodo, yang lebih dikenal dengan sebutan insiden “kartu kuning”. Aksi tersebut kemudian ramai diberitakan oleh berbagai media di Indonesia. Banyaknya media yang memberitakan juga turut berpengaruh terhadap perspektif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana khalayak memaknai pesan dari teks media yang ditawarkan. Media yang dipilih untuk melihat pemaknaan khalayak mengenai insiden “kartu kuning” Ketua BEM UI adalah portal berita Tribunnews.com, yang merupakan portal berita yang paling banyak diakses menurut Alexa.com sebagai penyedia data *traffic web*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan tersebar ke dalam tiga posisi khalayak mengacu pada teori penerimaan pesan Hall (1997). Ketiga posisi pemaknaan tersebut terdiri dari *dominant-hegemonic reading*, *negotiated reading*, dan *oppositional reading*.

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Sanen (2019) yang menunjukkan bahwa pemaknaan tayangan Hitam Putih edisi pengusaha berada pada posisi dominan dan negosiasi. Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi informan, antara lain: (1) pendidikan, (2) hobi dan tingkat minat informan untuk menjadi pengusaha, (3) penilaian informan tentang latar belakang dari bintang tamu (narasumber). Pemaknaan juga dipengaruhi oleh *performance* narasumber

dalam menyampaikan informasi. Jika narasumber yang dihadirkan tepat dan penyampaiannya mudah dipahami semua kalangan, hasil pemaknaan informan cenderung berada di posisi dominan. Ruliasto (2019) dalam penelitiannya mengungkap bahwa infografis pada akun Instagram @tirto.id merupakan visualisasi dari rangkuman informasi yang ada dalam portal tirto.id. Khalayak melakukan interpretasi berdasarkan ketertarikan visual, kemudahan mendapatkan informasi dan kebaruan atau keunikan yang dimiliki infografis. Hasil interpretasi khalayak menunjukkan dua kategori pemaknaan. Terdapat sembilan khalayak yang termasuk ke dalam kelompok *dominant-hegemonic* dan satu orang khalayak yang melakukan *negotiated reading*. Sementara itu, Instagram dirasa cukup efektif memberikan kemudahan bagi khalayak dengan sifat interaktif. Penelitian yang berkenaan dengan penggunaan penerimaan pesan juga dilakukan oleh Vicelia (2018). Penelitiannya mengkaji ketertarikan dan tanggapan mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia FIB UNS angkatan 2016 terhadap proses alih wahana yang terjadi pada puisi Hujan Bulan Juni (HJB) karya Sapardi Djoko Damono. Puisi HJB dialihwahanakan ke dalam bentuk komik yang kemudian dimuat Kompas pada Juni 2011. Simpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2016 sepakat bahwa proses alih wahana HJB bukan merupakan kesalahan ataupun kemunduran dalam berkarya dan proses kreativitas menulis. Sebaliknya, proses alih wahana merupakan gambaran tentang kemajuan kepenulisan di era globalisasi agar karya sastra selalu berkembang dan tidak ketinggalan zaman.

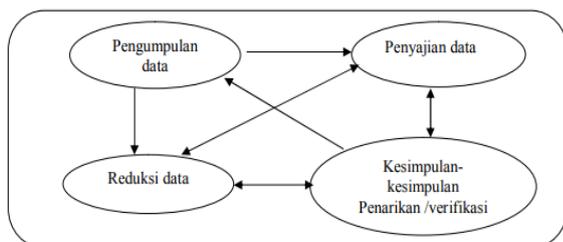
Berdasarkan uraian penjelasan teori resepsi pesan tersebut, artikel ini akan melihat

penerimaan pesan yang disampaikan auditor dalam rekomendasi hasil pemeriksaan dan kemudian diterima oleh *auditee* atau penerima pesan. Jika hasil penerimaan ternyata dominan maka terjadi similaritas pemaknaan, sedangkan apabila muncul negosiasi atau oposisi maka terdapat disimilaritas pemaknaan dalam memahami rekomendasi yang diterapkan melalui SiPTL. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menyikapi perbedaan pemaknaan atas teks rekomendasi, sehingga penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang memiliki latar belakang pemeriksaan dan yang tidak memiliki latar belakang pemeriksaan. Partisipasi informan yang menjadi objek penelitian bersifat sukarela. Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur secara langsung kepada informan dengan panduan wawancara yang memungkinkan diajukannya pertanyaan terbuka dan memberi ruang bagi pengembangan pertanyaan dan jawaban. Pengumpulan data dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan Mei 2019. Secara singkat, peneliti menanyakan sepuluh sampel rekomendasi yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan kepada *auditee*, untuk menggali pemahaman *auditee* terhadap isi pesan teks rekomendasi tersebut. Sepuluh rekomendasi yang menjadi sampel sebelumnya telah dikomunikasikan dengan penulis (auditor pemeriksa) yang akan dijadikan pembanding dan dasar pengambilan kesimpulan pada penelitian ini.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan mikro, wawancara dilakukan dengan informan terbatas. Data hasil diskusi dianalisis menggunakan analisis data interaktif (B. Miles *et al.*, 2014). Adapun model interaktif yang dimaksud adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: B.Miles *et al.*, 2014.

Tahapan analisis data tersebut terdiri dari: (1) Pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan data objek penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi; (2) Reduksi data merupakan tahap penggabungan atau klasifikasi data yang sama dari subjek yang berbeda; (3) Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan berguna dalam merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu; (4) Penarikan kesimpulan, yaitu intisari atau ringkasan dari hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Berikut adalah informan yang terpilih dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan antara lain:

**Tabel 1.** Daftar Informan

No	Inisial	Instansi	Pengalaman Pemeriksaan
1	AN	Kementerian ESDM	Tidak Ada
2	TR	Kementerian Perhubungan	Tidak Ada
3	AL	Badan Pemeriksa Keuangan 1	Ada
4	FJ	Badan Pemeriksa Keuangan 2	Ada
5	TQ	Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ada
6	YY	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	Tidak Ada
7	KS	Badan Pemeriksa Keuangan 3	Ada

Sumber : Pengolahan data. 2019.

Penelitian ini didasarkan pada teori *reception analysis* Hall (1997) yang menjelaskan bahwa setiap pesan yang diterima oleh partisipan menghasilkan pemaknaan yang berbeda-beda, baik itu dominan, negosiasi maupun oposisi. Peneliti menjadikan dasar penentuan penerimaan pesan, apakah diterima secara dominan, negosiasi dan atau oposisi berdasarkan hasil konfirmasi peneliti terhadap auditor pembuat rekomendasi, yang dibandingkan dengan jawaban dari setiap

informan atas sampel rekomendasi yang peneliti ajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penekanan pertanyaan dalam pelaksanaan wawancara mengarah pada teks rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Peneliti menyampaikan satu per satu teks rekomendasi, kemudian informan menerjemahkan maksud rekomendasi yang diajukan sesuai dengan yang mereka pahami.

Tidak hanya sampai di situ, agar lebih mendalam, peneliti menanyakan kemungkinan jawaban lain yang dapat diungkapkan oleh informan.

Selain sampel rekomendasi yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, peneliti juga menanyakan latar belakang tugas dan pokok fungsi informan dalam lembaga dan juga apakah informan pernah mendapatkan pengalaman melakukan audit laporan keuangan. Adapun hasil penelitian atas dasar wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Rekomendasi 1 (satu) berbunyi *“Melaksanakan optimalisasi dalam mengelola, mengembangkan pengetahuan sumber daya manusia pengelola keuangan, aset dan Teknologi Informasi serta auditor sebagai pre-review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui diklat/bimtek, serta memanfaatkan keahlian/kompetensi sumber daya manusia yang ada melalui penempatan dan pendistribusian pegawai yang tepat”*. Rekomendasi ini menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan informan AL terhadap rekomendasi tersebut mempunyai kesesuaian makna. Beliau menyatakan:

*“Untuk menjawab rekomendasi tersebut menurut saya, Pemda harus melaksanakan optimalisasi dalam mengelola keuangan dengan memberikan bukti pelaksanaan atau keikutsertaan SDM dalam diklat terkait, yang dibuktikan dengan sertifikat, SPJ pengadaan bimtek dan dokumen lainnya. Rekomendasi dapat dikatakan selesai jika telah memiliki hasil pengukuran bobot kerja”*.

Hal tersebut sesuai dengan maksud pembuat rekomendasi yaitu bahwa rekomendasi tersebut dapat dikatakan selesai

tindak lanjutnya apabila *auditee* melampirkan daftar hadir bimtek, sertifikat kegiatan, Laporan Keuangan Bimtek, matriks pengukuran bobot kerja dan Surat Keputusan (SK) penempatan pegawai. Adapun pemaknaan negosiasi diutarakan oleh enam informan lainnya yaitu AN, TR, FJ, TQ, YY, dan KS. Informan AN berpendapat:

*“Kalau saya membaca rekomendasi itu, akan dapat dikatakan selesai tindak lanjutnya jika mereka melampirkan dokumen peta jabatan dan rencana jalur karir. itu cukup menjawab maksud si pembuat rekomendasi kayanya, mas”*.

Informan FJ menyatakan bahwa:

*“Bukti pelaksanaan Diklat (surat panggilan Diklat), SK penempatan pegawai, analisis jabatan pegawai berdasarkan kompetensi teknis itu saja cukup menurut saya”*

Informan TQ juga memaknai rekomendasi tersebut sebagai berikut:

*“Kalau saya yang memahaminya ya Mas, untuk menyelesaikan tindak lanjut, yang harus dilakukan adalah:*

*(1) Surat Perintah Bupati harus ada. (2) harus melakukan Bimtek/Diklat pengelolaan keuangan yang diikuti Pengelola Keuangan (Bendahara, Kasubbag Keuangan, Pengurus Barang, dan Auditor). Nanti, bukti yang dilampirkan antara lain Undangan Diklat/Bimtek Keuangan, Daftar Hadir Diklat, Laporan Pelaksanaan Bimtek/Diklat dan SK Kepala Dinas terkait penempatan PNS sesuai kompetensi dan kebutuhan”*.

Rekomendasi 2 (dua) menyatakan *“Memerintahkan secara tertulis Sekretaris*

Daerah supaya melakukan pemantauan dan pengendalian yang memadai dalam koordinasi tiga unit terkait yaitu Biro Keuangan, Biro Aset dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pihak yang mengadakan dan memanfaatkan aset daerah". Teks rekomendasi tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan dinyatakan oleh beberapa informan. Informan TQ menjelaskan bahwa:

"Kalau untuk yang ini, yang harus dipersiapkan antara lain, pertama, Surat Perintah Bupati kepada Sekretaris Daerah. Kedua, harus dilaksanakan tuh rapat Sekda dengan Biro Keuangan beserta Biro Aset dan SKPD. Kalau untuk buktinya, bisa melampirkan seperti Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat dan Notulen".

Informan KS berpendapat:

"Wah Mas, kalau menurutku sih cukup melakukan inventarisasi, terus Hasil inventarisasi aset antara Biro Aset dan SKPD dilampirkan dan ditunjukkan ke BPK. Sama hasil rekon biro keuangan dan biro asetnya juga perlu dilampirkan".

Informan YY juga berkomentar:

"Maaf kalau salah ya, Mas Ery. Kalau menurut saya sih cukup melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) untuk masing-masing bidang yang dituju dalam temuan itu, Mas. Itu sudah cukup dikatakan selesai tidak lanjutnya jika bisa menunjukkannya".

Informan FJ dan AL pun menyatakan hal yang sama dengan ketiga informan di atas dan mempunyai kesesuaian makna dengan pembuat rekomendasi. Pembuat rekomendasi menyatakan: "Rekomendasi tersebut dapat

dikatakan selesai tindak lanjutnya apabila auditee melampirkan surat perintah melakukan pemantauan, daftar hadir rapat, dan notula rapat".

Pemaknaan negosiasi disampaikan oleh informan AN sebagai berikut:

"Menurut saya, untuk rekom kedua ini mungkin cukup melampirkan Nota Dinas dari Sekda kepada tiga biro, dan melakukan sosialisasi dari biro terkait pemanfaatan aset daerah".

Informan TR memaknai teks rekomendasi 3 sebagai berikut:

"Kalau saya mungkin cukup membuat Nota Dinas untuk melakukan pemantauan dan pengendalian kepada tiga biro terkait saja, Pak".

Teks rekomendasi 3 (tiga) berbunyi, "Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Biro Aset dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait supaya melakukan inventarisasi untuk memproses aset lainnya pada masing-masing SKPD". Pembacaan terhadap teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Secara keseluruhan, pemaknaan informan TQ, AL, KS, FJ, dan AN mempunyai kesesuaian makna dengan pembuat rekomendasi. Kesesuaian pemaknaan dominan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut dapat dikatakan selesai tindak lanjutnya apabila auditee melampirkan surat perintah melakukan inventarisasi dan laporan hasil inventarisasi.

Informan TQ menyatakan:

"Kalau untuk rekomendasi ke tiga ini, pertama harus disiapkan Surat Perintah Bupati kepada Kepala Biro Aset; kedua, Surat Perintah Bupati kepada kepala SKPD. dan terakhir menunjukkan Hasil Inventaris masing-masing SKPD".

Informan FJ menerangkan bahwa:

*"Hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain perlu membuat surat dari KDH kepada Kepala Biro Aset dan para kepala SKPD terkait supaya melakukan inventarisasi untuk memproses aset lainnya pada masing-masing SKPD. Selain itu, harus dilampirkan juga bukti pelaksanaan dan hasil inventarisasi"*.

Adapun pemaknaan negosiasi disampaikan informan TR sebagai berikut:

*"Apa ya, mungkin cukup dengan surat edaran saja, Pak. Kemudian disampaikan ke dinas terkait"*.

Pemaknaan negosiasi terhadap teks rekomendasi tersebut juga disampaikan informan YY sebagai berikut:

*"Cukup dengan melampirkan surat perintah melakukan inventarisasi, rekomendasi tersebut dapat dinyatakan selesai tindak lanjutnya. Mungkin itu, Mas"*

Rekomendasi 4 (empat) berbunyi sebagai berikut *"Memerintahkan Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi(TP/TGR) untuk segera memproses piutang akibat ketekoran kas pada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait"*. Teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan disampaikan oleh informan AL yang mempunyai kesesuaian makna. Kesesuaian pemaknaan dominan menyatakan bahwa rekomendasi tersebut dapat dikatakan selesai tindak lanjutnya apabila *auditee* melampirkan laporan hasil sidang majelis dan bukti setor.

Informan AL mengungkapkan:

*"Jadi itu, Mas Bro, mungkin yang diinginkan auditor. Mereka harus melakukan sidang majelis dan melampirkan hasil sidang majelis tersebut. Setelah diputuskan kan harus dibayar tuh, kalau belum bayar belum dikatakan selesai. Pokoknya sampai uang itu diterima negara atau daerah, yang dinyatakan dengan bukti penyetoran ke kas daerah"*.

Pemaknaan negosiasi diutarakan oleh informan TQ sebagai berikut:

*"Langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat Surat Perintah Bupati kepada Majelis TP/TGR untuk melakukan sidang, yang dilanjutkan dengan rapat majelis TP/TGR tentang pemrosesan piutang daerah. Nanti, dokumen lampiran yang harus dibuat yaitu Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, dan Notula Rapat. Kemudian melaporkan dan membuat surat majelis TP/TGR kepada Bupati hal laporan"*.

Informan YY juga memiliki pemaknaan negosiasi sebagaimana tampak dalam pernyataannya sebagai berikut:

*"Kalau pengalaman saya, kasus-kasus TP/TGR harus terbit Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), Mas. Itu yang harus disampaikan ke BPK"*.

Informan lainnya juga memaknai teks rekomendasi dengan pemaknaan negosiasi. Hal ini tampak dari dianggap cukupnya tindak lanjut rekomendasi tersebut dengan melampirkan notula sidang majelis TP/TGR

saja, tidak sampai pada tahap pengembalian ke kas negara/daerah.

Rekomendasi 5 (lima) berbunyi: *“Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan koordinasi antarbagian di Dinas Pendapatan Daerah”*. Teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan tampak dari pernyataan informan AL, KS, TQ, dan FJ yang mempunyai kesesuaian makna.

Informan AL menyatakan sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya, redaksi rekomendasi kurang tepat karena tidak ada ukuran capaian yang jelas untuk menyelesaikan temuan tersebut. Tapi kalau membaca rekomendasi itu ya paling Surat Perintah untuk melakukan koordinasi di antara dinas tersebut, dan juga perlu melakukan rekonsiliasi reguler, yang nantinya jika ada temuan serupa perlu melampirkan laporan rekonsiliasi reguler tersebut”*.

Sebuah pemaknaan disebut dominan menurut pembuat rekomendasi apabila rekomendasi tersebut dianggap selesai tindak lanjutnya dengan dilampirkannya surat perintah dan hasil rekonsiliasi antarbagian oleh *auditee*.

Pemaknaan negosiasi diutarakan oleh informan AN sebagai berikut:

*“Secara bahasanya, mungkin Dispenda perlu melakukan sosialisasi terkait koordinasi antarbagian yang bermasalah, Mas. Nanti buktinya bisa pakai dokumentasi pelaksanaan sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi”*.

Informan YY dan TR pun memaknai teks rekomendasi tersebut dalam kategori negosiasi. Pendapat keduanya memiliki redaksi yang hampir sama yaitu rekomendasi dapat dikatakan selesai ditindaklanjuti apabila *auditee* melampirkan surat perintah melakukan koordinasi antarbagian pada Dinas Pendapatan Daerah.

Rekomendasi 6 (enam) berbunyi, *“Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus sehingga dapat diketahui status barang dan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang yang tidak diketahui keberadaannya (hilang) serta menetapkan nilai kerugian daerah yang harus diganti atas barang-barang milik daerah tersebut”*. Teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan terlihat dari pernyataan informan TQ.

*“Wah, kebetulan ini sama instansinya dengan saya. Kalau misal satuan kerja kita yang mendapat rekomendasi tersebut, kita akan segera melaksanakan pemeriksaan khusus tersebut. Tetapi, ya, harus ada mandat dulu dari bupati. Nanti saat melaporkan ke BPK, kami akan menyampaikan dokumen berupa surat perintah bupati kepada Inspektur. kemudian surat tugas riksus dan laporan hasil riksus”*.

Informan AL juga memiliki pemaknaan dominan, sebagaimana tampak pada pernyataan sebagai berikut:

*“Yang pastinya harus dilaksanakan pemeriksaan tersebut. Nanti yang disampaikan ke BPK sebagai dokumen tindak lanjut berupa laporan hasil pemeriksaan khusus yang sudah selesai dilaksanakan”*.

Empat informan lainnya seperti KS, AN, FJ dan YY juga menunjukkan pemaknaan dominan atau kesesuaian makna. Menurut pembuat rekomendasi, pemaknaan dominan muncul ketika rekomendasi tersebut dapat dinyatakan selesai tindak lanjutnya apabila *auditee* melampirkan surat tugas pelaksanaan pemeriksaan khusus dan laporan hasil pemeriksaan khusus atas barang daerah yang tidak diketahui keberadaannya.

Adapun pemaknaan negosiasi dinyatakan oleh informan TR sebagai berikut:

*"Kalau saya, Pak, memaknai teks rekomendasi tersebut bisa dianggap selesai tindak lanjutnya cukup dengan menunjukkan surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan khusus kepala daerah kepada Inspektorat"*.

Rekomendasi 7 (tujuh) berbunyi *"Memerintahkan Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban dan pembayaran perjalanan dinas"*. Teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan tampak dari pernyataan informan AL sebagai berikut:

*"Ini sama dengan temuan sebelumnya, Mas. Rekomendasi kurang tepat karena tidak ada ukuran capaian yang jelas. Jawaban saya, ya sama seperti yang tadi, surat perintah saja sudah cukup"*.

Informan TQ menyatakan:

*"Dari redaksinya, untuk menyelesaikan rekomendasi ini yaitu perlu melampirkan Surat Perintah Bupati kepada Kepala SKPD selaku PA serta mungkin biar ada*

*komitmen perlu ditambahkan Surat Pernyataan Kepala SKPD selaku PA"*.

Informan AN, TR, dan FJ pun mempunyai kesesuaian makna dominan. Yakni, bahwa dalam menyelesaikan rekomendasi diperlukan adanya surat perintah untuk melakukan pengawasan. Adapun kesesuaian pemaknaan dominan menurut pembuat rekomendasi adalah sebagai berikut:

*"Sebuah rekomendasi dianggap selesai ditindaklanjuti apabila auditee dapat menunjukkan dan melampirkan surat perintah kepada pengguna anggaran agar lebih cermat dalam pengelolaan anggaran"*.

Pemaknaan negosiasi dikemukakan oleh informan KS sebagai berikut:

*"Kalau dari redaksi, mungkin cukup dengan surat perintah, Mas. Tapi mungkin yang dimaksud pembuat rekomendasi, temuan itu selesai jika auditee juga harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) perjalanan dinas"*.

Pemaknaan negosiasi juga disampaikan oleh informan YY sebagai berikut:

*"Selain membuat surat perintah, mungkin perlu juga dibuat laporan kartu kendali kegiatan perjalanan dinas, Mas, agar lebih terpantau prosesnya"*.

Rekomendasi 8 (delapan) berbunyi sebagai berikut: *"Memerintahkan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk lebih cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menarik kelebihan pembayaran total sebesar Rpxxxx,xx dari*

rekanan dan menyetorkannya ke Kas Daerah". Teks rekomendasi tersebut menghasilkan pemaknaan yang sama dari semua informan yaitu pemaknaan dominan, seperti yang diungkapkan informan YY berikut.

*"Untuk masalah-masalah pengembalian buktinya satu aja cukup, Mas. Yang penting ada bukti setor (STS), keterangan bahwa itu sudah masuk ke kas negara atau daerah. tapi biasanya kalau di dinas-dinas jika masalah ini sudah masuk ke dalam LHP BPK maka jenjang struktural berlaku. Jadi biasanya dinas nunggu surat perintah dulu dari pimpinan daerah".*

Kesesuaian pemaknaan dominan menurut pembuat rekomendasi menyatakan bahwa rekomendasi tersebut dikatakan selesai tindak lanjutnya apabila *auditee* melampirkan surat perintah kepada pengguna anggaran untuk lebih cermat dalam pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan bukti setor atas kelebihan pembayaran ke kas negara.

Rekomendasi 9 (sembilan) berbunyi *"Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD supaya melakukan rekonsiliasi pencatatan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara teratur"*. Teks tersebut menghasilkan pemaknaan dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan terlihat dari pernyataan informan TQ berikut.

*"Untuk menjawab rekomendasi ini perlu melampirkan dokumen Surat Perintah Bupati kepada Kepala BPKAD. Intruksi*

*dari Kepala DPPKAD. dan Laporan Rutin hasil rekonsiliasi pencatatan dengan BUMD secara teratur"*

Pemaknaan dominan yang lain disampaikan oleh informan FJ.

*"Kalau ini, perlu surat dari KDH ke Kepala DPPKAD. surat Kepala DPPKAD kepada Kepala Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD supaya melakukan rekonsiliasi pencatatan dengan BUMD secara teratur dan bukti telah melakukan rekonsiliasi anatara Pemda dengan BUMD bisa berupa laporan hasil rekonsiliasinya atau minimal notula hasil pertemuan keduanya"*

Informan AL dan KS pun mempunyai pemaknaan dominan. Pendapatnya sesuai dengan maksud dari pembuat rekomendasi yang menyatakan bahwa rekomendasi tersebut dapat dikatakan selesai tindak lanjutnya apabila *auditee* melampirkan surat perintah dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), surat perintah dari Kepala DPPKAD kepada Kepala Akuntansi dan Pelaporan untuk melakukan rekonsiliasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hasil rekonsiliasi aset pada BUMD.

Adapun pemaknaan negosiasi tampak dari pernyataan informan AN sebagai berikut.

*"Mungkin, Mas, perlu dibuatkan nota dinas saja disampaikan ke DPPKAD untuk melakukan rekonsiliasi dengan BUMD"*.

Informan TR menambahkan,

*"Bupati perlu membuat surat edaran ke dinas yang bertanggung jawab mengurus BUMD, Pak"*.

Adapun informan YY memaknai teks rekomendasi tersebut sebagai berikut:

*"Kalau yang ini, Mas, bisa saja dianggap selesai tindak lanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Perintah dari Kepala Daerah kepada Kepala DPPKAD dan Surat Perintah dari Kepala DPPKAD kepada Kepala Akuntansi, Mas".*

Rekomendasi 10 (sepuluh) berbunyi: *"Memerintahkan kepada Bupati "XYZ" agar menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menarik kembali uang atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan sebesar Rpxxxx,xx, kemahalan basic price sebesar Rpyyyy,yy, dan denda sebesar Rpzzzz,zz dan disetorkan ke Kas Daerah".* Rekomendasi sepuluh menunjukkan pemaknaan yang sama dari semua informan yaitu pemaknaan dominan. Menurut pembuat rekomendasi,

*"Ini juga sama dengan sampel nomer delapan ya, kalau masalah pengembalian, pasti ujung-ujungnya STS. Tapi biasanya secara birokrasi, auditee harus melampirkan surat perintah kepada pengguna anggaran agar lebih cermat dalam pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan pengadaan dan kemudian ditambahkan dengan bukti setor atas kelebihan pembayaran ke Kas Negara".*

Pernyataan tersebut selaras dengan yang diungkapkan KS berikut ini.

*"Surat Bupati kepada Kepala Dinas PU, STS pengembalian atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan sebesar Rp21.199.871,38 dan denda sebesar Rp40.342.500,00 dan disetorkan ke Kas".*

**Tabel 2.** Matriks Hasil Penelitian

No	Sampel Rekomendasi	Hasil Pemaknaan
1	Rekomendasi 1	Dominan dan Negosiasi.
2	Rekomendasi 2	Dominan dan Negosiasi.
3	Rekomendasi 3	Dominan dan Negosiasi.
4	Rekomendasi 4	Dominan dan Negosiasi.
5	Rekomendasi 5	Dominan dan Negosiasi.
6	Rekomendasi 6	Dominan dan Negosiasi.
7	Rekomendasi 7	Dominan dan Negosiasi.
8	Rekomendasi 8	Dominan.
9	Rekomendasi 9	Dominan dan Negosiasi.
10	Rekomendasi 10	Dominan.

Sumber: Pengolahan Data. 2019.

Dari hasil pemaknaan teks rekomendasi di Tabel 2 yang dijabarkan dengan teori Hall (1997), dua dari sepuluh sampel rekomendasi menunjukkan kerangka pemikiran dengan makna yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi yang ditulis oleh auditor berhasil dikomunikasikan dengan baik kepada penerima pesan. Adapun delapan sampel rekomendasi lainnya menunjukkan dua

penafsiran dari penerima pesan. Penelaahan lebih lanjut menemukan beberapa informan yang kritis. Terutama informan AL dan KS yang berani mengkritisi redaksional dari rekomendasi tersebut. Sebuah rekomendasi haruslah jelas ukuran capaian penyelesaiannya untuk mengurangi perbedaan penafsiran makna akibat ukuran yang bersifat relatif. Dari hasil tersebut juga dapat dinyatakan bahwa

latar belakang pemeriksaan pada informan akan memengaruhi tingkat pemaknaan pesan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran McQuail (2011) yang menyatakan bahwa analisis resepsi menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalamannya. Apabila informan dikategorikan menjadi informan auditor dan informan nonauditor, pemaknaan atas rekomendasi yang diberikan informan auditor akan lebih luas, tidak sebatas memaknai konteks yang tertulis pada teks rekomendasi. Lain halnya dengan pemaknaan yang dilakukan oleh informan nonauditor yang tampak hanya memaknai apa yang diungkap jelas pada teks rekomendasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaknaan yang didapat dari setiap informan bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaan, interpretasi, pengalaman pemeriksaan, dan latar belakang pekerjaan dari informan. Pemaknaan atas sepuluh sampel rekomendasi berdasarkan teori *Reception Analysis* dari Hall (1997) menunjukkan bahwa dua rekomendasi memiliki pemaknaan dominan, sedangkan delapan sisanya memiliki makna dominan dan negosiasi. Pemaknaan dominan muncul apabila jawaban dari informan sudah sesuai dengan maksud isi pesan rekomendasi yang ditulis oleh auditor pembuat rekomendasi. Adapun pemaknaan negosiasi terjadi apabila sebagian jawaban informan masih memiliki perbedaan maksud dengan pembuat rekomendasi.

Dari hasil tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan SiPTL hasil pemeriksaan yang mereduksi komunikasi *face*

*to face* belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pertemuan untuk rekonsiliasi dan penyamaan persepsi, agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai dengan maksud temuan pemeriksaan di lapangan.

Penelitian ini baru sebatas melihat bagaimana pemaknaan informan terhadap teks rekomendasi untuk menyimpulkan efektivitas penerapan teknologi komunikasi dalam sistem informasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Informan yang memiliki pengalaman pemeriksaan cenderung menunjukkan pemaknaan dominan, sedangkan informan yang tidak memiliki pengalaman pemeriksaan akan memahami pesan teks rekomendasi dengan pemaknaan negosiasi. Guna mendapatkan hasil yang representatif, mungkin perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah informan dan mengetahui pola komunikasi antara BPK dengan *auditee* sebelum dan sesudah laporan hasil pemeriksaan terbit.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat bantuan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi karya tulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books*. New York: Sage Publications.
- BPK-RI. (2017). *Penggunaan Siptl Dalam Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Di Bpk Pada 10th Meeting Of Intosai WGVBS*

- Di Mexico City*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019, website: <https://www.bpk.go.id/news/bpk-memaparkan-penggunaan-siptl-dalam-pengawasan-tindak-lanjut-rekomendasi-hasil-pemeriksaan-di-bpk-pada-10th-meeting-of-intosai-wgvbs-di-mexico-city>
- Choudrie, J., Islam, M. S., Wahid, F., Bass, J. M., & Priyatma, J. E. (2017). Preface. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology*. Jakarta: UI Perss.
- Dance, F.E. X. & Larson, C. E. (1976). *The Functions of Human Communications: A Theoretical Approach*. Holt, Rinehart & Winston. New York: McGraw-Hill.
- Ellis, D. (2010). *Medium Theory*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019, website: [https://www.sage-reference.com/communicationtheory/Article\\_n240.html](https://www.sage-reference.com/communicationtheory/Article_n240.html).
- Flew, T. (2008). *New Media : an introduction*. Oxford: Oxford University Pers.
- Fulk, J. (1987). *A Sosial Information Processing Model of Media Use in Organizations*. Diakses pada tanggal 12 April 2019, website: <https://doi.org/10.1177/009365087014005005>
- Gachene, B. (2016). Community empowerment through participatory resource assessment at Kathekakai settlement scheme, Machakos County, Kenya. *International Journal of Sociology and Anthropology*, Vol. 8(2), hal. 15-22.
- Hall, S. (1997). *Chapter One. The work of representation. In Representation: Cultural representations and signifying practices*. London: Sage Publisher.
- Holmes, D. (2010). *Komputer-Mediated Communication*. Diakses pada tanggal 22 Maret 2019, website: [http://www.sage-reference.com/communicationtheory/Article\\_n64.html](http://www.sage-reference.com/communicationtheory/Article_n64.html).
- Kenneth, L. ., & Jane, L. . (2012). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*. Jakarta: Salemba Empat.
- McLuhan, M. (2001). *Understanding media: the extensions of man*. London: Routledge Classics.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Meyrowitz, J. (2019). Medium Theory. *Communication theory today, The International Encyclopedia of Media Literacy*, hal. 50-77. California: Stanford University Press
- PANRB. (2014). *Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah*. 30 April 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Pratminingsih, S. A. (2006). *Komunikasi Bisnis (edisi 1)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Roger, E. . (2003). *Diffusion and Innovations (5th ed.)*. New York: Free Press.
- Ruliasto, F. K. (2019). *Analisis Resepsi Pembaca Infografis Pada Followers Instagram @Tirtoid*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Sanen, B. F. (2019). *Analisis Resepsi Tayangan "Hitam Putih" Episode Pengusaha Di Trans 7*. Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
- Sely, T., & Aladdin, Y. A. (2019). Analisis Resepsi Pembaca Tribunnews.Com Dari Kalangan Mahasiswa/I Universitas Indonesia Terhadap Insiden "Kartu Kuning" Ketua BEM UI. *Jurnal SEMIOTIKA*, Vol. 12(1), hal. 62–72.
- Ujang, S. (2007). *Kapita Selekta Komunikasi Pendekatan Budaya dan Agama (1st ed.)*. Bandung: Simbiosia Rekatama

Media.

Vicelia, F. V. (2018). *Analisis Resepsi  
Komikalisasi Puisi Hujan Bulan Juni*

*Karya Sapardi Djoko Damono*. Tesis,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Surakarta: Universitas Sebelas Maret.